

ISU NUKLIR DALAM HUBUNGAN ISRAEL - IRAN

Simela Victor Muhamad

1

Abstrak

Isu nuklir dalam hubungan Israel-Iran kembali memanas, terutama setelah Israel, yang khawatir dengan proyek pengayaan uranium Iran, menyerukan skenario militer untuk menghentikan program nuklir Iran tersebut. Tulisan ini membahas isu nuklir dalam hubungan Israel dan Iran, dan bagaimana seharusnya hal tersebut disikapi masyarakat internasional. Kehadiran Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), sebagai forum multilateral untuk membatasi program nuklir Iran tidak membuat Israel percaya dan bisa menerima kehadiran program nuklir Iran. Penyikapan Israel tersebut patut direspons masyarakat internasional karena menimbulkan situasi tidak kondusif bagi keberlanjutan negosiasi program nuklir Iran yang kini tengah diupayakan kembali. Situasi yang tidak kondusif ini perlu dicari solusinya. Opsi militer harus dicegah, sedangkan pendekatan multilateralisme, terutama dalam kerangka JCPOA, harus menjadi pijakan dalam mencari solusi atas isu nuklir Iran. Indonesia, melalui jejaring diplomasi yang dimilikinya, harus menjadi bagian yang terus menyuarakan pentingnya pendekatan multilateralisme dalam mengatasi berbagai persoalan internasional, termasuk soal isu nuklir Iran.

Pendahuluan

Di tengah upaya menghidupkan kembali negosiasi nuklir Iran di Wina, Austria, pada awal Desember 2021, muncul ketegangan baru antara Israel dan Iran. Israel yang khawatir dengan proyek pengayaan uranium Iran menyerukan skenario militer untuk menghentikan proyek itu. Bagi Israel, proyek pengayaan uranium Iran merupakan ancaman serius, dan terhentinya perundingan nuklir bisa berimplikasi pada kelanjutan proyek nuklir Iran, dan hal tersebut bagi Israel merupakan ancaman. Israel yang dulu dekat

dengan Iran, tetapi sejak 1990-an menjadi musuh, bersiap-siap dengan opsi militer meskipun tanpa melibatkan Amerika Serikat (AS). Pemerintah dan media Israel kini gencar membangun kesadaran dan menyiapkan psikologis rakyat Israel bahwa opsi perang dengan Iran bisa menjadi keniscayaan untuk mencegah negara itu memiliki bom nuklir (Rahman, Kompas, 5 Desember 2021). Namun, pilihan ini sudah pasti tidak mudah.

Kekhawatiran Israel terhadap program nuklir Iran dilatarbelakangi oleh adanya laporan Badan Energi



Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/ IAEA*), yang menyebutkan bahwa Pemerintah Iran terus menjalankan proses pengayaan uranium hingga mencapai tingkat kemurnian 20% dengan sentrifugal canggih. Proses pengayaan uranium itu dilakukan di dalam fasilitas Pengayaan Bahan Bakar Fordow yang tersembunyi di dalam gunung. Laporan IAEA tersebut beredar saat berlangsung perundingan kesepakatan nuklir Iran di Wina, Austria (Kompas, 3 Desember 2021). Hal tersebut dikhawatirkan akan menambah ketegangan pada perundingan yang sudah tertunda selama lima bulan itu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, isu nuklir yang kembali memanas dalam hubungan Israel-Iran ini berpotensi berkembang ke arah konflik terbuka. Kajian singkat ini mencoba membahas isu nuklir dalam hubungan Israel-Iran, dan bagaimana seharusnya hal tersebut disikapi masyarakat internasional.

Program Nuklir Iran

Program nuklir Iran, yang dilakukan melalui pengayaan uranium, dan yang memicu ketegangan dengan Israel, menarik untuk diungkap terlebih dahulu. Kepala IAEA, Rafael Grossi, menyebut program pengayaan uranium Iran sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, tingkat pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran disebut Grossi hampir setara dengan program senjata, bukan untuk kebutuhan komersial. Dia menuturkan, Iran tengah memperkaya uranium pada tingkat kemurnian yang hanya dicapai oleh negara-negara pembuat bom. Komentar Grossi muncul ketika Iran dan kekuatan global sedang bernegosiasi di Wina, Austria, pada awal Desember 2021 (thejakartapost.com., 1 Desember 2021). Negosiasi

itu dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah yang harus diambil Iran agar bisa kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015.

AS sempat menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018 ketika Donald Trump memimpin AS. Kini, di bawah Presiden Joe Biden, AS kembali aktif ke dalam *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*, sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negerinya, dan berupaya membatasi program nuklir Iran seperti yang telah disepakati masyarakat internasional (republika.co.id., 30 November 2021). Kesepakatan masyarakat internasional terkait program nuklir Iran, yang tertuang dalam JCPOA sejak 2015 itu mencakup level pengayaan uranium, kapasitas pengayaan, stok uranium, stok plutonium, dan pengawasan (tempo.co.id., 19 Mei 2019).

Untuk level pengayaan uranium, kesepakatan ini membatasi level kemurnian pengayaan uranium hexafluoride pada 3.67%, jauh di bawah level 90% sebagai basis untuk membuat senjata nuklir. Batasan ini berlaku hingga 15 tahun. Untuk kapasitas pengayaan, kesepakatan mengizinkan Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium di instalasi yang terdapat di Natanz dengan pembatasan; sementara Fordow menjadi pusat teknologi fisika dan nuklir, dan digunakan untuk memproduksi isotop, yang bermanfaat untuk kegiatan damai non-militer. Untuk stok uranium, Iran mendapat pembatasan jumlah stok uranium yang diperkaya pada level rendah yaitu 300 kilogram uranium hexafluoride pada level 3.67% selama 15 tahun. Sedangkan terkait plutonium, kesepakatan meminta Iran untuk mendesain ulang reaktornya, sehingga Iran tidak bisa memproduksi senjata berbasis plutonium. Sementara, dalam

hal pengawasan, IAEA memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inspeksi atau memaksa masuk ke sebuah fasilitas, dan juga berwenang untuk melakukan pengecekan harian di instalasi Natanz dan Fordow selama 15 tahun.

Ketidakpercayaan Israel terhadap Iran

Kehadiran JCPOA yang membatasi program nuklir Iran tidak serta merta membuat Israel percaya begitu saja dan bisa menerima kehadiran program nuklir Iran. Bagi Israel, laporan IAEA yang terungkap pada awal Desember 2021, yang antara lain mengungkapkan bahwa Iran telah mulai meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya, bahkan hingga 60%, dianggap sudah cukup untuk mengkritisi dan mewaspadai pengembangan program nuklir Iran. Dalam pandangan Israel, sebagaimana pernah dikemukakan oleh mantan Perdana Menteri (PM) Israel, Ehud Barak, proses pengayaan uranium Iran dari 60% hingga 90% untuk keperluan pembuatan senjata nuklir adalah sesuatu hal yang sangat mungkin dan dapat dilakukan secara singkat serta sulit dideteksi, termasuk oleh IAEA sendiri (voaindonesia.com., 4 Desember 2021).

Kekhawatiran Israel atas peningkatan kapasitas Iran dalam pengayaan uranium, telah mendorong PM Israel, Naftali Bennett, mengeluarkan pernyataan keras yang meminta penghentian segera perundingan nuklir antara Iran dan negara-negara besar di Wina. Ia menuduh Iran telah melakukan pemerasan lewat nuklir (mediaindonesia.com., 2 Desember 2021). Pernyataan keras PM Bennett yang meminta penghentian perundingan antara Iran dan negara-

negara besar (yang mencakup China, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan AS) di Wina memperlihatkan ketidakpercayaan Israel atas program nuklir Iran, yang dinilainya sebagai ancaman serius bagi negaranya, dan oleh karena itu, perlu disikapi secara tegas, termasuk melalui opsi militer.

Naftali Bennett, yang terpilih sebagai PM Israel pada bulan Juni 2021, menggantikan Benjamin Netanyahu, yang berlatar belakang pengusaha ini dikenal sebagai sosok kontradiktif. Pria 49 tahun, mantan sekutu Netanyahu dan pernah menjabat sebagai menteri pertahanan Israel ini, merupakan sosok yang menentang kemerdekaan Palestina dan sangat mendukung pembangunan permukiman warga Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur. Pendirian keras Bennett tampaknya juga diarahkan kepada Iran, yang kini tengah mengembangkan program nuklir, dan dianggapnya sebagai ancaman nyata bagi keamanan Israel.

Penyikapan keras Israel atas Iran telah diungkapkan PM Bennett dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2021 lalu, yang menyebut program nuklir Iran telah mencapai titik krusial dan mendesak masyarakat internasional untuk bertindak melawan Iran (republika.co.id., 28 September 2021). Penyikapan keras Israel yang kembali diungkap di tengah upaya menghidupkan kembali perundingan nuklir Iran di Wina, Austria, awal Desember 2021, menunjukkan ketidakpercayaan Israel atas program nuklir Iran. Lebih jauh lagi, penyikapan keras atau resistensi Israel terhadap Iran tersebut dapat juga dibaca sebagai upaya Israel untuk mempertahankan supremasi kekuatan di Timur Tengah sehingga bisa menguasai Palestina.

Sikap Masyarakat Internasional

Situasi yang tidak kondusif di atas perlu segera dicari solusinya oleh masyarakat internasional untuk mencegah para pihak yang berseteru ini menggunakan cara-cara militer dalam menyelesaikan persoalan di antara mereka. Keberadaan mesin perang tercanggih dari masing-masing negara bisa dipastikan akan digunakan oleh Israel dan Iran jika terjadi konflik terbuka. Jika perang terbuka Israel-Iran sampai terjadi, ini adalah perang antara dua negara yang secara geografis terpisah ribuan kilometer. Model perang yang akan terjadi adalah adu kekuatan antara teknologi pesawat tempur jarak jauh dan teknologi rudal balistik jarak jauh berikut sistem pertahanan masing-masing. Untuk pesawat tempur, Israel memiliki keunggulan pesawat tempur siluman jarak jauh generasi kelima buatan AS, F-35. Israel juga memiliki varian pesawat tempur multiperan F-16 dengan versi tercanggih. Sementara Iran, memiliki keunggulan rudal balistik jarak jauh, Shahab-3 dan Sejil, keduanya memiliki jangkauan tembak hingga 2.500 km; jarak Teheran-Tel Aviv sejauh 2.363 km, dan secara teori artinya rudal balistik Iran mampu menjangkau kota Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel (Rahman, Kompas, 5 Desember 2021).

Masyarakat internasional, sudah tentu, tidak berharap perseteruan antara Israel dan Iran menyangkut isu nuklir ini berkembang ke arah konflik terbuka. Menyikapi situasi yang tidak kondusif di atas, Sekjen PBB Antonio Guterres, yang pernah mendesak AS untuk mencabut sanksi atas Iran sesuai dengan isi kesepakatan nuklir pada 2015, meminta para pihak yang menaruh perhatian pada isu

nuklir Iran, termasuk Israel, untuk memberi kepercayaan kepada proses perundingan nuklir Iran yang kini tengah diupayakan kembali. (news.un.org., 29 November 2021). Sekjen PBB, yang menilai kesepakatan nuklir Iran penting untuk keamanan Timur Tengah, juga meminta Israel, sebagai seteru Iran, untuk tidak mengeluarkan pernyataan atau melakukan tindakan provokatif yang bisa memicu konflik terbuka.

Sementara itu, sebagai kelanjutan dari pertemuan G-20 di Roma (Italia) pada akhir Oktober 2021 lalu, para pemimpin dari AS, Jerman, Prancis dan Inggris kembali mendesak Iran untuk melanjutkan kepatuhan terkait kesepakatan nuklir 2015 demi menghindari eskalasi berbahaya di masa depan, dan mengharapakan solusi dari negosiasi yang kini tengah diupayakan kembali (thejakartapost.com., 30 November 2021). Bisa dipahami jika para pihak yang berseteru, Israel dan Iran, atas dasar kepentingan masing-masing bersikukuh pada pendiriannya. Iran berkepentingan dengan program nuklirnya untuk kemajuan negaranya, meski harus dipantau terus oleh masyarakat internasional (melalui IAEA) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengembangannya. Sementara, Israel juga berkepentingan untuk menjaga keamanan wilayahnya dari ancaman serangan nuklir yang datang dari luar, khususnya Iran yang menjadi rival utamanya di kawasan.

Terhadap situasi yang mewarnai hubungan Israel dan Iran dalam soal nuklir tersebut, tidak ada jalan lain bagi masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas melalui pendekatan multilateralisme dalam menyikapinya. Khusus soal program nuklir Iran, pendekatan multilateralisme melalui

jalur perundingan antara Iran dan sejumlah negara besar (yang melibatkan China, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan AS) dan juga IAEA, harus menjadi pijakan bagi masyarakat internasional, termasuk Israel, dalam menyikapi program nuklir Iran. Sementara, terhadap sikap sepihak Israel atas program nuklir Iran juga harus disikapi oleh masyarakat internasional melalui pendekatan multilateralisme, antara lain melalui PBB, dengan mengingatkan dan meminta Israel untuk tidak mengambil jalan sendiri dalam menyikapi soal nuklir Iran.

Penutup

Isu nuklir dalam hubungan Israel dan Iran tidak boleh berkembang menjadi “bola liar” yang sulit dikendalikan, atau bahkan mengarah pada terjadinya konflik terbuka, mengingat yang dirugikan atau yang menjadi korban tidak saja masyarakat sipil yang bermukim di Israel dan Iran, tetapi juga kawasan Teluk dan Timur Tengah, atau bahkan lebih luas lagi, karena banyak dari masyarakat internasional yang juga memiliki kepentingan dengan Israel dan Iran serta kawasan di sekitarnya. Oleh karena itu, opsi militer dalam mengatasi isu nuklir Iran harus dicegah. Pendekatan multilateralisme, terutama melalui jalur negosiasi dalam kerangka *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), harus menjadi pijakan bagi masyarakat internasional dalam mencari solusi atas isu nuklir Iran. Indonesia, melalui jejaring diplomasi yang dimilikinya, termasuk di PBB dan G-20, harus menjadi bagian yang terus menyuarakan pentingnya pendekatan multilateralisme dalam mengatasi berbagai persoalan internasional.

Referensi

- “AS dan Iran Mulai Gelar Perundingan Nuklir”, 30 November 2021, <https://www.republika.co.id/berita/as-dan-iran-mulai-gelar-perundingan-nuklir>, diakses 5 Desember 2021.
- “IAEA: Iran Terus Perkaya Uranium”, *Kompas*, 3 Desember 2021, hal. 4.
- “Iran’s Nuclear Program Back in Spotlight”, 30 November 2021, <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/11/29/irans-nuclear-program-back-in-spotlight.html>, diakses 6 Desember 2021.
- “Iran Nuclear Talks Resume with Upbeat Comments Despite Skepticism”, 1 Desember 2021, <https://www.thejakartapost.com/iran-nuclear-talks-resume-with-upbeat-comments-despite-skepticism.html>, diakses 6 Desember 2021.
- “Israel Makin Khawatirkan Kemajuan Program Nuklir Iran”, 4 Desember 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/israel-makin-khawatirkan-kemajuan-program-nuklir-iran/6258439.html>, diakses 6 Desember 2021.
- “PM Israel Desak Tindakan terhadap Iran di PBB”, September 2021, <https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/pm-israel-desak-tindakan-terhadap-iran-di-pbb>, diakses 6 Desember 2021.
- “PM Israel Serukan AS Hentikan Segera Pembicaraan Nuklir Iran”, 2 Desember 2021, <https://mediaindonesia.com/internasional/pm-israel-serukan-as-hentikan-segera-pembicaraan-nuklir-iran>, diakses 6 Desember 2021.

Rahman, Musthafa Abd. (2021). "F-35 Israel Versus Rudal Shahab-3 Iran", *Kompas*, 5 Desember 2021, hal. 3.

"Seruan Para Pemimpin Barat Soal Kesepakatan Nuklir Iran di Sela KTT G-20", 31 Oktober 2021, <https://news.detik.com/internasional/seruan-para-pemimpin-barat-soal-kesepakatan-nuklir-iran-di-sela-ktt-g20>, diakses 6 Desember 2021.

"UN Chief Calls for Nuclear Weapons-Free Middle East", 29 November 2021, <https://news.un.org/en/story/2021/11/1106732>, diakses 6 Desember 2021.

"5 Poin dari Kesepakatan Nuklir Iran", 9 Mei 2019, <https://dunia.tempo.co/read/5-poin-dari-kesepakatan-nuklir-iran/>, diakses 5 Desember 2021.



Simela Victor Muhamad
simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di *Jurnal Politica* Vol 7 No. 1, Mei 2016); "Peran *Asian Parliamentary Assembly* dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di *Jurnal Politica*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017); "Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan" (bagian dari buku *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018); dan "*Proxy War* dalam Konflik di Lebanon" (bagian dari buku *Proxy War* di Timur Tengah, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.